

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Program Kampung Iklim yang dilakukan oleh Indonesia adalah salah satu strategi implementasi *Paris Agreement* di Indonesia. Pelaksanaannya secara desentralisasi memberikan banyak kemudahan dan keleluasaan untuk Proklim dalam mengatasi masalah-masalah terkait lingkungan dan iklim di daerah-daerah Indonesia. Seperti yang dijelaskan di bab sebelumnya, Proklim ini telah membantu daerah-daerah di Indonesia dalam menghadapi masalah lingkungan dan iklim. Selain itu Proklim ini juga membantu Indonesia dalam mencapai tujuan dalam *Paris Agreement* yaitu penurunan emisi karbon. Kegiatan Proklim juga dapat memberikan manfaat dalam aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial sesuai pasal 4 dan pasal 10 *Paris Agreement*, dan dapat meningkatkan aspek ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Program Kampung Iklim memenuhi tolak ukur environmentalisme dalam hubungan internasional karena Proklim adalah bentuk pengimplementasian *Paris Agreement* di Indonesia dan dalam pelaksanaannya, Proklim memenuhi nilai-nilai *Resource Conservation, Human Welfare Ecology, Preservation, Animal Liberation*, dan *ecocentris* dari semua kegiatan di dalam Proklim. Proklim ini juga memenuhi tolak ukur desentralisasi karena memiliki kesinambungan struktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah lokal melalui struktur regulasinya, dan memiliki struktur *bottom up* dari pemerintahan lokal. Program ini juga memiliki kekuatan pembuatan keputusan yang sama di semua kelas sosial dan kelas ekonomi. Proklim ini membantu pemerintah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepekaan terhadap kebutuhan dan tuntutan yang berbeda di tiap daerah. Program ini juga memperbesar kemandirian antara kelompok dan organisasi daerah yang menjalankan Proklim serta mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan program-program dalam mengatasi masalah-masalah terkait lingkungan hidup dan iklim.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program Kampung Iklim, penulis menyarankan agar pemerintah daerah dapat lebih memperketat pengawasan

dan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan evaluasi yang terus menerus, program dapat terus diperbaiki sehingga mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, penulis juga berharap pemerintah pusat dapat membangun kerangka besar sistem yang dapat membantu pelaksanaan program Kampung Iklim menjadi lebih optimal, efisien, transparan, dan merata di seluruh wilayah Proklamasi. Dengan adanya kerangka besar sistem yang terintegrasi dengan baik, diharapkan program dapat dikelola dengan lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang terlibat dalam program.

